

ABSTRAK

PERBANDINGAN KUALITAS PROSEDUR PEMILIHAN PRESIDEN DI SINGAPURA DAN INDONESIA

Oleh

RISKA GUSTIANI

Pemilihan Presiden yang dilaksanakan secara demokratis diharapkan mampu menjadikan pergantian pemerintahan menjadi tertib dan damai. Berdasarkan indeks *The Perceptions of Electoral Integrity* (PEI) yang dilakukan oleh Pippa Norris menyebutkan bahwa persepsi integritas pemilihan umum di Indonesia dan Singapura berkategori sedang. Namun dalam beberapa indikator pada indeks tersebut, pemilihan umum di Singapura lebih unggul daripada pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbedaan sistem pemilihan presiden di Indonesia dan Singapura, serta membandingkan antara kedua sistemnya berdasarkan teori Pippa Norris. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada informan dan studi dokumen yang terkait dengan pemilihan presiden di Indonesia dan Singapura. Hasil penelitian menunjukkan pemilihan presiden di Singapura merupakan proses yang ketat dan terstruktur, dengan calon yang harus memenuhi kriteria kelayakan. Proses pemberian sertifikat kelayakan diawasi oleh Komite Pemilihan Presiden yang independen. Persyaratan calon di Singapura lebih ketat dibandingkan dengan Indonesia, terutama terkait dengan pengalaman dan kualifikasi finansial. Proses pemungutan suara di Singapura merupakan kewajiban bagi warga yang memenuhi syarat. Sementara di Indonesia, proses pemilihan presiden berlangsung lebih longgar dengan penghitungan suara secara manual, namun tetap menjaga integritas dan transparansi dengan dukungan teknologi terbatas. Penyelenggaraan pemilihan presiden di Indonesia ditangani oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP, sementara di Singapura pemilihan presiden diselenggarakan oleh *Elections Department Singapore* (ELD).

Kata Kunci: Pemilihan Presiden, Singapura, Indonesia.

ABSTRACT

COMPARISON OF THE QUALITY OF PRESIDENTIAL ELECTION PROCEDURES IN SINGAPORE AND INDONESIA

By

RISKA GUSTIANI

The democratic presidential elections are expected to ensure a smooth and peaceful transition of government. According to The Perceptions of Electoral Integrity (PEI) index conducted by Pippa Norris, the perception of electoral integrity in Indonesia and Singapore falls into the moderate category. However, in several indicators of the index, the electoral process in Singapore outperforms that of Indonesia. This study aims to describe the differences in the presidential election systems between Indonesia and Singapore, and to compare them based on Pippa Norris's theory. The research method used is qualitative descriptive with data collection techniques through interviews with informants and document studies related to presidential elections in Indonesia and Singapore. The results of the study indicate that the presidential election process in Singapore is rigorous and structured, including eligibility criteria for the candidate. The qualification certificate issuance process is overseen by an independent Presidential Elections Committee. Candidate requirements in Singapore are stricter compared to Indonesia, especially regarding experiences and financial qualifications. The voting process in Singapore is mandatory for eligible citizens. Meanwhile, in Indonesia, the presidential election process is more lenient with manual vote counting, but still maintains integrity and transparency with limited technological support. The organization of presidential elections in Indonesia is handled by the KPU, Bawaslu, and DKPP, while in Singapore, presidential elections are organized by the Elections Department Singapore (ELD).

Key words: Presidential Election, Singapore, Indonesia.